

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah tidak ada penulisan yang bersifat asli, dalam hal ini skripsi menjadi salah satu dari bentuk karya tulis ilmiah. Tinjauan literatur berguna untuk landasan teori dalam penelitian. Landasan teori ini dapat diambil dari penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa atau pendapat dari para pakar menurut subjek yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan menghimpun informasi dari beberapa literatur maupun penelitian terdahulu karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Informasi yang dihimpun oleh penulis diambil dari jurnal, buku, skripsi dan beberapa berita online yang memiliki kesinambungan dengan yang diteliti penulis.

Topik utama yang ditinjau oleh penulis yaitu mengenai deforestasi. Deforestasi merupakan penurunan kondisi luas dari hutan yang diakibatkan oleh konvensi lahan karena infrastruktur, pembukaan pemukiman, pertanian, pertambangan, dan juga perkebunan, dimana hal tersebut dapat memberikan dampak negative seperti pemanasan global (Nakita & Najicha, 2022). Deforestasi di Indonesia terjadi karena adanya pembukaan lahan sawit yang semakin pesat, mengingat Indonesia merupakan salah satu eksportir kelapa sawit terbesar dengan total nilai ekspor mencapai US\$17,36 miliar pada tahun 2020 (V. A. Dihni, 2020).

Literatur pertama yang akan diambil oleh penulis menilik dari tema deforestasi sehingga penulis mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk jurnal sebagai jurnal pembanding dengan yang ditulis oleh penulis yang berjudul **“Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International Ltd”** yang ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan (Virgy et al., 2020).

Pada latar belakang masalah yang dituliskan oleh penulis dalam jurnal tersebut terdapat penjelasan mengenai strategi Greenpeace dalam membentuk suatu jaringan advokasi transnasional untuk berkomitmen terhadap komitmen *No Deforestation, No Peat, No Explanaton* (NDPE). Mengingat perluasan areal

perkebunan kelapa sawit Indonesia yang semakin membesar. Terdapat penjelasan mengenai isu perhatian NGO yang terfokus terhadap isu lingkungan terkait isu deforestasi oleh industri kelapa sawit. Dimana dalam permasalahan ini Wilmar International Ltd, sebagai perusahaan yang merupakan anggota *Consumer Goods Forum*, mendapatkan perhatian utama dari Greenpeace Indonesia karena ketidak konkritan dalam melaksanakan komitmen yang diumumkan pada tahun 2013. Komitmen ini ditujukan untuk menghentikan rantai pasok minyak kelapa sawit dari deforestasi, dengan tenggat waktu pelaksanaan paling lambat pada tahun 2020.

Dalam jurnal ini pun menjelaskan mengenai upaya NGO, yaitu Greenpeace Indonesia yang memiliki tujuan dalam menghentikan laju deforestasi di hutan Indonesia dan lahan gambut yang hilang karena masifnya industri kelapa sawit. Dimana Wilmar International Ltd memiliki andil penting mengingat perusahaan tersebut merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasannya Greenpeace Indonesia melakukan beberapa metode advokasi seperti publikasi laporan terhadap suatu isu konfrontasi yang dilakukan oleh Wilmar International Ltd karena menurut Greenpeace Indonesia Wilmar International Ltd tidak mempublikasikan peta konsesi perkebunan sawitnya sebagai implementasi dari komitmen NDPE yang mereka buat, perusahaan tersebut ditenggarai melakukan praktik deforestasi masif terhadap hutan di Indonesia melalui kegiatan perluasan lahan areal kelapa sawit. Namun, Wilmar menyangkal hal tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Dalam jurnal tersebut, para peneliti mengungkapkan bahwa Greenpeace Indonesia sebagai NGO dalam mensukseskan upaya penekanan terhadap komitmen NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar International Ltd membentuk jaringan advokasi yang bersifat transnasional guna menekan Wilmar International Ltd untuk mengubah arah komitmennya dengan melibatkan organisasi lain yang memiliki power lebih kuat dan pada akhirnya mendapat bantuan power dari Greenpeace International. Jaringan advokasi transnasional ini memiliki andil penting dalam menekan Wilmar International Ltd untuk mengurangi deforestasi yang ada di Indonesia demi mendukung lestarnya hutan yang ada di Indonesia. Tak hanya itu peran jaringan advokasi internasional membentuk jaringan yang memungkinkan

suatu pihak secara strategis menggerakkan informasi mengenai suatu isu dengan maksud untuk meyakinkan, menekan, dan mendapatkan pengaruh dari organisasi dan pemerintah lain yang jauh lebih berpengaruh daripada pihak yang menginisiasi pembentukan jaringan tersebut. Namun, pembeda antara penulisan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan lebih terfokus terhadap upaya kerjasama yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan Greenpeace International demi menekan Wilmar International Ltd dalam upaya merealisasikan komitmen NDPE dari tahun 2013 sampai 2018. Karena dalam rentang waktu yang dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa deforestasi yang terjadi tidak mengalami perlambatan kendati demikian deforestasi mengalami peningkatan hingga tahun 2018 yang mana Wilmar International Ltd berkomitmen kembali demi menerapkan komitmen NDPE. Sedangkan penulis lebih menekankan terhadap praktik dan upaya seperti apa yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menekan Wilmar International Ltd demi mewujudkan komitmen NDPE melalui praktik organisasi internasional melalui teori *green politic*.

Literatur kedua dalam penelitian ini adalah (Abdul, 2022) dengan judul **“Upaya Greenpeace Dalam Mendorong Realisasi Komitmen *No Deforestation, No Peat, No Explanation* (NDPE) di Indonesia Oleh Wilmar International Ltd Limited Periode 2014-2018”** dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul menjelaskan bahwasannya deforestasi tertinggi di Indonesia pernah terjadi pada periode 2014-2015 dan sebanyak 1,09 juta lahan telah hilang.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya kelapa sawit merupakan salah satu akibat yang mendorong terjadinya kerusakan hutan karena adanya aktivitas deforestasi. Ekspansi kelapa sawit menyumbang 11 persen praktik deforestasi di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Dijelaskan pula bahwa Greenpeace menilai komitmen *No Deforestation, No Peat, No Explanation* (NDPE) yang dijanjikan oleh Wilmar International Ltd Pada tahun 2013 komitmen yang dibuat oleh Wilmar nyatanya tidak dijalankan secara serius. Kendati demikian komitmen NDPE yang dikeluarkan oleh Wilmar diberikan tenggat hingga Desember 2015 demi mewujudkan penghentian praktik deforestasi, namun dalam

realisasinya Wilmar justru masih masif melakukan praktik deforestasi tersebut. Dalam penelitian tersebut, Abdul juga menjelaskan bahwasannya Wilmar telah menjadi pihak pertama dari produsen-produsen nakal yang ada di pasaran. Upaya Greenpeace dalam menekan Wilmar International Ltd melalui komitmen yang telah dijanjikan oleh Wilmar masih terus dilakukan kendati Wilmar dalam perkembangannya masih terus melangsungkan praktik deforestasi.

Literatur yang ditulis oleh Abdul ini lebih menjelaskan mengenai masifnya praktik deforestasi oleh perusahaan besar yaitu Wilmar International Ltd di Indonesia. Tak hanya itu dijelaskan pula bahwa Wilmar tidak benar-benar mempraktikkan komitmen *No Deforestation, No Peat, No Explanation* (NDPE) yang telah mereka janjikan pada tahun 2013. Sehingga upaya Greenpeace sebagai organisasi internasional memiliki peran penting dalam menekan dan merealisasikan komitmen NDPE yang telah dibuat oleh Wilmar International Ltd

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu dalam membahas upaya Greenpeace demi merealisasikan komitmen NDPE yang telah dibuat oleh Wilmar pada tahun 2013 mengingat dari literatur yang dijelaskan oleh Abdul bahwa komitmen NDPE tidak dilaksanakan dengan baik. Greenpeace menekan agar Wilmar mau membuktikan komitmen yang telah dibuat atas dasar praktik deforestasi yang masif berlangsung per tahun 2015 dan semakin luas.

Literatur ketiga berjudul ***“Deforestasi Hutan Indonesia: Wilmar International Ltd, Greenpeace dan Sikap Penolakan Uni Eropa Terhadap Komoditas Produk Kelapa Sawit Indonesia”*** yang ditulis oleh (Marcelino, 2019) yang membahas mengenai konflik Greenpeace Indonesia dengan Wilmar International Ltd serta sikap Uni Eropa terhadap produk ekspor kelapa sawit Indonesia yang mengalami penolakan karena berketerkaitan dengan permasalahan deforestasi hutan di Indonesia.

Literatur ini menjelaskan bahwa persetruan Greenpeace Indonesia dengan Wilmar International Ltd mengusung aktor internasional yaitu Uni Eropa melalui jaringan *Transnational Advocacy Network* demi menekan dan mempengaruhi Wilmar International Ltd Menurut Marcelino identifikasi pandangan Uni Eropa

terhadap penolakan produk kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu komitmen ekonomi yang diterapkan untuk membatasi sistem perdagangan suatu negara dengan mengatur tata cara perdagangan, memberlakukan tarif pajak masuk pada barang impor, menerapkan pembatasan kuota, dan bahkan melarang impor. Pendekatan analisis yang digunakan oleh Marcelino terdapat di tingkat internasional karena unit analisis yang terlibat ialah negara dan institusi internasional, seperti Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Uni Eropa.

Literatur ini dipilih oleh penulis karena memiliki kesamaan dalam membahas organisasi internasional yang memiliki peran dalam menekan Wilmar International Ltd sebagai salah satu perusahaan besar pelaku praktik deforestasi hutan. Organisasi internasional seperti Uni Eropa diperlukan karena memberikan power lebih dalam menekan dan mempengaruhi komitmen *No Deforestation, No Peat, No Explanation* (NDPE) yang dibuat oleh Wilmar International Ltd pada tahun 2013. Penekanan dilakukan karena laju deforestasi di Indonesia semakin pesat akibat adanya faktor ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Literatur keempat adalah (Coroniti, 2022) dengan judul ***“Historical and Future Role of Wilmar Palm Oil in Deforestation of Indonesian Borneo”*** yang menjelaskan tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dan peran utama Indonesia dalam produksi kelapa sawit menjadi landasan utama penelitian ini. Fokus utama dari jurnal ini ialah peran sejarah dan masa depan Wilmar International Ltd dalam deforestasi di Kalimantan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Coroniti juga membahas mengenai dampak sejarah produksi kelapa sawit oleh Wilmar terhadap deforestasi di Kalimantan dan menganalisis langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan di masa depan.

Dalam literatur ketiga ini dijelaskan mengenai perkembangan industri pertumbuhan kelapa sawit di Kalimantan, didalamnya terdapat peran Wilmar International Ltd yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kelapa sawit. Penggunaan lahan yang digunakan oleh Wilmar diketahui merupakan lokasi-lokasi kritis deforestasi di Kalimantan karena keberadaan perkebunan Wilmar semakin meluas. Tak ayal hal tersebut memberi dampak terhadap lingkungan karena ekspansi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman

hayati, perubahan iklim, dan degradasi tanah. Menurut Coroniti hal tersebut memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi Masyarakat setempat.

Secara garis besar jurnal ini memberikan gambaran mengenai masifnya praktik deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar International Ltd meski telah membuat suatu komitmen pada tahun 2013 yaitu *No Deforestation, No peat, No Explanation* (NDPE), namun tekanan yang telah dilayangkan oleh organisasi internasional belum membuahkan hasil signifikan. Dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa pada tahun 2018, kerusakan hutan hujan semakin bertambah menggiring kemajuan ekonomi dari Wilmar, kecaman dari NGO seperti Mongabay dan Greenpeace terus dilakukan untuk menagih janji komitmen mereka terkait komitmen NDPE yang memiliki tenggat waktu hingga awal 2015 yang tidak tercapai. Wilmar ditekan demi perwujudan terhadap komitmen komitmen yang telah dibuat yang memiliki tenggat waktu hingga tahun 2020.

Literatur yang dituliskan oleh Coroniti ini menjeaskan bagaimana peranan organisasi internasional berperan dalam praktik deforestasi masif yang semakin gencar di Kalimantan. Meskipun upaya-upaya komitmen di tingkat nasional seperti pemerintah belum diupayakan namun setidaknya organisasi internasional yang terfokus pada lingkungan yaitu Greenpeace membantu memberikan bantuan dalam bentuk kampanye demi mencegah praktik deforestasi yang semakin pesat di Kalimantan.

Dari pernyataan tersebut jurnal yang ditulis oleh Coroniti ini memiliki aspek yang berkesinambungan dengan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis mengenai **“Upaya Greenpeace Dalam Menekan Wilmar International Ltd Dalam Menanggulangi Deforestasi di Kalimantan Tengah”** didalamnya terdapat perbandingan ialah lokasi penelitian yang lebih diperinci mengingat daerah Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan praktik deforestasi tertinggi ketimbang daerah Kalimantan lainnya. Tak hanya itu pembaharuan dari karya ilmiah penulis ini memiliki perpanjangan waktu terhadap bagaimana Wilmar International Ltd mengupayakan tekanandari Greenpeace Indonesia terhadap komitmen yang telah mencapai tenggat waktu pada taun 2020.

Literatur kelima dengan judul *“Deforestation and Social Resilience: A Case Study of Gunung Mas District-Central Kalimantan”* (Hidayat & Sinaga, 2021), membahas mengenai deforestasi karena adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang semakin meningkat sejak awal tahun 2000-an. Dimana menurut Hidayat perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah mendapatkan izin hak guna usaha (HGU) di Alokasi Penggunaan Lahan (APL) seluas 371.00 hektar di Kabupaten Gunung Mas-Kalimantan Tengah. Dimana pemberian izin tersebut telah menimbulkan konflik sosial dan ekologis terhadap Masyarakat lokal. Karena tidak adanya izin usaha (IUP) dan izin lingkungan (Amdal) terhadap pembukaan kawasan hutan.

Literatur ini memberikan gambaran mengenai praktik deforestasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang menimbulkan beragam konflik dengan masyarakat. Praktik deforestasi yang semakin masif menimbulkan protes masyarakat karena mengambil areal lahan masyarakat mengambil batas-batas lahan hutan adat, tidak menerapkan penanaman terhadap lingkungan berkelanjutan. Literatur yang ditulis oleh Hidayat ini menjelaskan bahwa kondisi konflik lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah menimbulkan dampak deforestasi yang kritis dan menurunkan pendapatan terhadap hutan.

Pembahasan dari literatur ini menggiring opini terhadap konflik regional yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Yang mana konflik tersebut merupakan konflik terkait kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap perekonomian dan ketahanan sosial terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dijelaskan pula mengenai program pemerintah dalam meminimalisir dampak kerugian ekonomi, sosiologi dan ekologi. Menurut Hidayat pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat komitmen mengenai ‘perhutanan sosial’ terhadap partisipasi pengelolaan sumber daya hutan.

Bagi penulis, literatur ini memiliki kesinambungan dalam pembahasan praktik deforestasi yang terjadi daerah Kalimantan Tengah. Diketahui dari literatur tersebut bahwa praktik deforestasi paling banyak terjadi karena perluasan lahan kelapa sawit demi menunjang peningkatan perekonomian daerah, namun hal

tersebut menimbulkan konflik dengan masyarakat karena mengambil wilayah hutan adat. Dari literatur ini penulis dapat menilik sejauh mana peran pemerintah sebagai pemangku komitmen melihat hutan Indonesia yang seharusnya dijaga dan memiliki batasan-batasan terhadap pembukaan lahan teralih fungsikan dengan adanya lahan sawit.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Global Governance

Pada era 1980-an dan 1990-an, para teoretisi menyadari adanya perubahan yang lebih mendalam mengenai hubungan antar negara atau antara negara dengan individu. Karena perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, negara-negara dihadapkan pada tantangan baru, di mana kedaulatan negara dianggap rendah dan terbatas, serta struktur negara tidak mampu memberikan layanan publik yang dibutuhkan. Dalam hal ini dunia tidak lagi terstruktur sebagai kumpulan negara berdaulat yang memiliki kendali besar (meskipun tidak pernah sepenuhnya) terhadap perekonomian domestiknya. Sehingga membentuk suatu pola globalisasi yang menambahkan lapisan kompleksitas baru pada apa yang biasa disebut sebagai hubungan internasional yang melebihi, memudahkan, dan bahkan meredefinisi batas wilayah. Dua pernyataan ini secara singkat mencerminkan sifat perubahan dalam sistem global saat ini. Sistem ini tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip Westphalia, tetapi kini telah menjadi suatu sistem yang melibatkan berbagai aktor terhadap berbagai isu, sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Tata Kelola Global:

What is new today is that the interdependence of nations is wider and deeper. What is also new is the role of people and the shift of focus from states to people. An aspect of this change is the growth of international civil society. These changes call for reforms in the modes of international cooperation...(Commission on Global Governance, 1995)

Global governance merupakan sebuah pandangan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain dalam mencapai tujuan bersama dengan mengerahkan arahan-arahan yang strategis yang kemudian mengerahkan energi kolektif untuk mengatasi tantangan global supaya lebih efektif, karena hal ini haruslah bersifat inklusif, dinamis,

mampu menjangkau batas-batas serta kepentingan nasional dan sektoral. Menurut (Rosenau, 1995), bahwa institusi formal dan organisasi-organisasi yang memajemen dalam suatu peristiwa internasional yang terus berlangsung, hingga membayangkan memasukkan terhadap sistem-sistem aturan di semua tingkatan pada aktivitas manusia yang terus menerus mencari tujuan mengenai pengawasan sebagai reaksi atau akibat dari transnasional.

Sistem pemerintahan global melibatkan pembentukan serta penyesuaian institusi global dengan tujuan mengubah dampak dari proses globalisasi. Konsep *global governance*, yang melibatkan interaksi horizontal dan vertikal serta mengklaim keterlibatan semua pihak, memiliki orientasi yang lebih politis daripada sekadar konsep akademis. Di tingkat global, *good governance* dipandang sebagai suatu norma yang mencakup prinsip-prinsip jelas di dalamnya (Kurniawan, 2011).

Teori *Global Governance* menyoroti bahwasannya tantangan global tidak dapat diselesaikan dengan cara terpisah oleh negara-negara. Diperlukan pula kerja sama yang lebih luas serta efisien dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan demi mencapai tujuan bersama. Teori ini mencangkup gagasan mengenai tata Kelola global dengan pengaturan resmi oleh pemerintah atau lembaga internasional yang melibatkan beragam aktor non pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan secara global.

Global governance merupakan sebuah teori yang percaya terhadap kerangka konseptual berkaitan dengan bagaimana dunia mengelola isu-isu global dan melibatkan partisipasi aktor seperti negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Dari pengertian tersebut terdapat keterkaitan teori dengan karya ilmiah yang diteliti oleh penulis bahwasannya pengelolaan negara terhadap isu-isu global mengenai isu lingkungan yang semakin terpuruk. Mengingat keadaan lingkungan tak jauh dari pengaruh peran hutan sebagai paru-paru dunia yang kini luasnya semakin menurun akibat adanya deforestasi. Deforestasi hutan terjadi akibat

ketersediaan sumber daya hutan yang melimpah dan memiliki fungsi ekonomis (Ardiansyah, 2011). Tentu saja hal tersebut menjadi pertimbangan dan perhatian global, karena isu terkait penurunan luas hutan memiliki kesinambungan dengan permasalahan lingkungan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain (Coroniti, 2022).

2.2.2 Critical Theory

Pendekatan terhadap ketidaksetaraan, ketidakadilan serta dominasi pada tiap-tiap negara untuk membantu merefleksikan teoritikus demi mencapai wawasan yang lebih dalam mengenai transformasi politik melalui teori kritis (*critical theory*). Teori kritis memiliki berbagai macam teori mengenai hubungan antar tiap-tiap negara, teori ini menentang kebijaksanaan konvensional dalam hubungan antar negara serta memberikan perspektif baru untuk memahami dunia, pemahaman ini difokuskan terhadap konteks hierarki dalam sistem internasional serta peranan ekonomi dalam penentuan hierarki tersebut (Karns et al., 2015).

Berkaitan dengan organisasi internasional yang juga memiliki peranan kompleks dalam tatanan global, mengingat hubungan antarnegara bukan merupakan satu-satunya interaksi yang penting terkait kerjasama internasional dan tata kelola global. Dalam teori kritis memandang bahwa organisasi memiliki andil dalam membuat pilihan serta interaksi dengan masyarakat global. Perkembangan aktor dalam tata kelola global di sebuah organisasi menjadikan organisasi internasional merupakan bagian terpenting dalam hubungan kerjasama antar organisasi atau jaringan yang lebih luas (Karns et al., 2015).

Dalam perspektif teori kritis, organisasi internasional dianggap sebagai sarana eksploitasi oleh kapitalisme dan sebagai alat dominasi yang memperpanjang keterbelakangan. Mereka menyoroti bahwa organisasi internasional pada umumnya berfungsi sebagai instrumen untuk kepentingan kelas dan negara kapitalis. Sudut pandang ini menekankan bagaimana organisasi internasional dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong dominasi kapitalis yang diterapkan pada pihak lain, serta

sebagai alat untuk memperoleh dukungan terhadap dominasi tersebut melalui penyebaran ideologi bersama. Teori kritis menawarkan perspektif yang melihat organisasi internasional sebagai alat eksploitasi kapital dan sebagai mekanisme dominasi yang mempertahankan status quo yang menguntungkan kelas kapitalis. Kaum Marxis dan neo-Marxis menganggap organisasi internasional sebagai produk dari negara-negara dominan, gagasan-gagasan hegemonik, dan kepentingan kelas kapitalis (Karns et al., 2015).

2.2.3 *Green Politic Theory*

Gerakan mengenai lingkungan hidup telah muncul dan berkembang sejak tahun 1970-an, yang terinspirasi dari ilmu-ilmu yang sadar terhadap permasalahan lingkungan. Sebelumnya, gerakan ini hanya terfokus pada kritik Marx terhadap kapitalisme. Menurut Marx, kepemilikan adalah sumber segala bencana selama praktik terhadap pekerjaan kaum buruh, atau dengan kata lain, kaum miskin, masih berlangsung. Oleh karena itu, ketika komunisme mulai mendapat kecaman dari masyarakat dunia dan ditinggalkan karena tidak memberikan pembebasan dari ketertindasan kapital, banyak mahasiswa dari gerakan radikal mulai mencari wacana alternatif. Mereka memilih menggunakan isu lingkungan sebagai platform gerakan mereka untuk mengkritik proyek-proyek kapitalisme. Sejalan dengan gerakan tersebut, isu lingkungan juga menjadi komoditas dalam politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Politik lingkungan, yang sering disebut sebagai politik hijau (*Green Politic*), mulai melakukan perubahan. Gerakan yang pada awalnya hanya berupa aksi, kemudian mencoba untuk melembagakan diri dalam bentuk partai politik. Asumsinya, gerakan aksi itu sendiri tidak cukup untuk memengaruhi proses pengambilan komitmen. Oleh karena itu, dibutuhkan institusi seperti partai politik yang dapat menjadi bagian dari pengambilan komitmen di tingkat nasional atau lokal (Apriawan, 2011).

Gerakan *Green Politic* di Indonesia muncul akibat adanya kesadaran terhadap kondisi nasional karena pembangunan yang berorientasi terhadap

pertumbuhan dan mempengaruhi kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan krisis lingkungan. *Green politic* kemudian membuat perjanjian internasional dengan seluruh negara yang disepakati perihal permasalahan lingkungan. Dalam permasalahan lingkungan ini, para aktivis lingkungan mengajak aktor *non-governmental* dalam menangani isu lingkungan yang memburuk. Agenda lingkungan telah menjadi isu penting yang dibahas oleh seluruh negara di dunia, yang kemudian pada tahun 1990-an, konferensi Rio Earth di Rio de Janeiro, Brazil diadakan oleh negara-negara dunia. Konferensi tersebut membahas tentang lingkungan hidup, pembangunan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang diadopsi oleh 178 pemerintah negara yang hadir pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan (Paterson, 2016).

Teori *green politic* memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah yang disusun oleh penulis karena pembahasan mengenai deforestasi hutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit yang semakin masif menimbulkan isu politik global. *Green politic* mendorong kerjasama internasional untuk mengatasi deforestasi meliputi inisiatif global seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menjaga hutan dan lahan gambut. Mengingat deforestasi hutan menyumbang perubahan iklim global dengan pelepasan efek gas rumah kaca yang tersimpan di dalam pohon dan tanah. Terutama terhadap pembukaan lahan kelapa sawit yang merupakan salah satu model pembangunan merugikan berkelanjutan karena mendukung eksploitatif kerusakan lingkungan.

2.2.3 *Green Theory*

Krisis mengenai lingkungan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menjadi suatu isu global yang semakin diperbincangkan hingga saat ini dalam studi hubungan internasional (Turangan, 2022). Pada tahun 1990-an hubungan internasional menyadari bahwa isu lingkungan telah menjadi suatu isu global yang dipengaruhi oleh tindakan manusia karena memberikan perubahan terhadap iklim global sehingga menimbulkan

dampak yang merugikan terhadap lingkungan. Teori ini tidak hanya terfokus pada pemikiran mengenai perlindungan terhadap lingkungan, namun juga membahas mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini dikembangkan demi menciptakan pola pikir serta tindakan terhadap keberlanjutan bagi keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan alam semesta (Mc et al., 2017).

Green theory menjadi salah satu teori yang diambil penulis karena memiliki kerangka pemikiran yang ditekankan terhadap pentingnya pelestarian lingkungan alam dan menjaga keseimbangan ekologis. Teori ini membahas mengenai tindakan tanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mengenai konservasi lingkungan, kesadaran lingkungan, ekologi sosial, dan partisipasi serta demokrasi terhadap lingkungan. Contohnya ialah kelompok pribumi yang sangat bergantung pada hutan tidak hanya dalam aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam aspek spiritual. Namun, dalam analisis ini, penulis melihat bahwa masalah mengenai lingkungan tidak hanya terkait dengan masyarakat lokal semata, tetapi melibatkan beragam pihak. Berbagai aktor seperti NGO, akademisi, pemerintah lokal, dan bahkan perusahaan, hadir berdampingan di sekitar lingkungan alam tersebut (Turangan, 2022).

Pemikiran ekologis dalam *green theory* membahas mengenai kepentingan terhadap alam, karena memiliki keterkaitan dengan kepentingan manusia terhadap alam. *Green politic* mengekspresikan orientasi ini dalam konteks nilai dan peran politik. *Green politic* memiliki keterkaitan dengan teori kritis, yang berarti bahwa isu-isu lingkungan mengundang pertanyaan tentang hubungan antara individu dengan kerangka komunitas dan pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks ini, kemudian menciptakan pertanyaan mengenai batasan-batasan komunitas politik. Masalah lingkungan yang melintasi batas-batas tersebut kemudian diarahkan pada tingkat komunitas politik. Yang mana bagi para ahli teori lingkungan hal ini terletak pada gagasan alternatif tentang asosiasi politik yang didasarkan pada keterkaitan ekologis (Mc et al., 2017).

Dalam isu deforestasi yang diangkat oleh penulis memiliki kesinambungan dengan *green theory*. Isu deforestasi menjadi permasalahan global dimana hal tersebut mendorong terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan melindungi lingkungan. Diperlukan perilaku perubahan dari individu, sosial, dan politik agar senantiasa ramah terhadap lingkungan.

2.3 Asumsi Penelitian

Asumsi yang disusun merupakan suatu hal yang harus dijelaskan oleh penulis dan diyakini kebenarannya atas dugaan-dugaan yang muncul berdasarkan teori yang terkait. Asumsi memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta teori-teori yang telah disusun oleh penulis ketika melakukan penelitian ilmiah sebagai praduga sementara sehingga kebenaran dari asumsi yang diputuskan masih perlu diuji. Dalam hal ini, penulis memutuskan asumsi sebagai berikut:

“Dalam upaya penekanan Greenpeace terhadap komitmen *No Deforestation, No Peat, No Explanation* (NDPE) yang dikeluarkan oleh Wilmar International Ltd pada 5 Desember 2013, Greenpeace Indonesia terus melakukan kampanye demi mewujudkan upaya penurunan deforestasi yang ada di Kalimantan Tengah. Mengingat aktivitas Wilmar International Ltd telah melanggar janji komitmen yang mereka canangkan berkali-kali. Janji komitmen NDPE yang memiliki tenggat waktu hingga awal 2015 tidak tercapai. Wilmar International Ltd kemudian ditekan kembali secara berkala di tahun 2018 dan pada tahun 2020 demi perwujudan komitmen terhadap komitmen NDPE yang telah dibuat. Namun pada kenyataannya melihat kondisi Wilmar yang memiliki riwayat bermasalah pengimplementasian komitmen mengenai pengurangan deforestasi hutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit yang dijanjikan dalam komitmen NDPE kembali gagal dijalankan”.

2.4 Kerangka Analisis

